

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA MASSA PADA PROSES
POLITIK PILKADA DI KABUPATEN PINRANG
(SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS)**



SKRIPSI

Oleh :

SYAMSUDDIN

10538241012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2018**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA MASSA PADA PROSES
POLITIK PILKADA DI KABUPATEN PINRANG
(SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

SYAMSUDDIN

10538241012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Media Massa Pada Proses Politik Pilkada Di Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Sosiologis)

Nama : Syamsuddin

NIM : 10538241012

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

08 Safar 1440 H

Makassar,

18 Oktober 2018 M

Disahkan oleh

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



Dr. Muhammad Akhir, M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Syamsuddin**, NIM 10538241012 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H

Makassar, -----

18 Oktober 2018 M

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., M.M

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji

1. Dr. H. Nurhulani, M.Si

2. Suardi, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Murtajir, M.Pd.

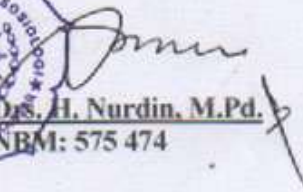
4. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang yang sukses adalah selalu belajar dari kegagalan

Dan bangkit untuk bergerak maju menuju inovasi yang baik”

**Intelligence is not the determinant of success, but hard work is
the real determinant of your success.**

*(Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu
kesuksesanmu yang sebenarnya).*

Kupersembahkan kepada

Kedua Orang Tuaku

Dan Partner hidup (Istri) Saya Tercinta Serta

Saudara-saudariku yang tak henti-hentinya

Memberikan semangat hidup, serta

Sahabat-sahabatku yang setia menemani

Hingga dapat menyelesaikan pendidikan di

Universitas Muhammadiyah Makassar.

ABSTRAK

Syamsuddin, 2018. “*Efektivitas penggunaan media massa pada proses politik pilkada di kabupaten pinrang (Suatu Tinjauan Sosiologis)*”. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. H. Muhlis Madani M.Si dan Dr. Muhammad Akhir M.Pd.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara penentuan sampel melalui teknik *Purposive Sampling* dengan memilih beberapa informan yang memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui peran media cetak dan elektronik (media massa) dalam mempengaruhi pola perilaku masyarakat terhadap proses politik pilkada di kabupaten pinrang, (2) Untuk mengetahui dampak penggunaan media cetak dan elektronik (media massa) dalam proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang.

Dari hasil penelitian menunjukkan kehadiran media cetak dan media elektronik (media massa) dan penggunaannya dimasyarakat begitu berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dalam hal aktivitas politiknya, media massa sudah menjadi bagian dalam aktivitas kehidupan social masyarakat di Kabupaten Pinrang sehingga dari penggunaan media itu perilaku masyarakat menjadi berubah pula dalam hal aktivitas politik individu maupun masyarakat di kabupaten Pinrang. Penggunaan media politik Di kabupaten Pinrang sendiri telah berdampak positif maupun negatif dalam hal aktifitas politik individu maupun masyarakat di Kabupaten Pinrang itu sendiri. Banyak dampak positif yang di timbulkan tetapi begitupunlah dampak negatifnya.

Saran dari penelitian ini adalah Individu dan masyarakat harus lebih bijak menggunakan Media massa dalam aktifitas politiknya, tidak mudah terprovokasi dari dalam menanggapi berita-berita hoax yang muncul dimedia cetak maupun media elektronik (media massa), serta saran dari peneliti agar pemerintah melakukan control terhadap menyabarnya berita-berita kebencian dalam aktifitas politik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan rintangan disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Namun berkat bantuan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini sesuai dengan rencana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan selesainya tulisan ini berkat bantuan dari beberapa pihak yang dengan senang hati telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Halim, Ibunda Bulung dan saudara-saudaraku kandungku, Serta Seluruh Keluarga Besarku dan Untuk Partner Hidup (istri) saya Reski yang selalu membantu dalam penyelesaian karya tulis ini, Semoga tuhan SWT selalu ,memberikan kemudan urusan dan Rezeki kepada keluarga kita, serta saudara-saudaraku dari kelas Sosiologi D 2012 yang tidak dapat ku tulis satu persatu. Terima kasih telah memberikan doa, pertolongan materi, dorongan, serta semangat kepada penulis sehingga berbagai rintangan dan hambatan penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan dan bantuan kepada penulisan. Untuk itu

dengan segala hormat, penulis dapat ucapkan terima kasih buat Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M. Si_ selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Akhir, M. Pd. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada: (1) Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, (2) Bapak Erwin Akib. S.Pd.,M.Pd.,Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, (3) Drs. H. Nurdin. M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, atas segala bantuannya dalam kegiatan administrasi perkuliahan maupun dalam proses perkuliahan, (4) Segenap Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar Khususnya Jurusan pendidikan sosiologi yang telah mendidik dan membelajarkan serta memberikan ilmu kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah kita bermohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala, niat baik dan suci serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat ridho disisi-Nya, Amien ya rabbal alamiin.

Makassar, 5 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
.....	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERJANJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	5
C. Tujuan Penelitian	
.....	5
D. Manfaat Penelitian	
.....	6
E. Defenisi Operasional	
.....	7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka.....	
.....	8
1. Konsep Efektivitas	
.....	8
2. Pengertian Efektivitas	
.....	9
3. Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas	
.....	9
4. Media Massa	
.....	14
5. Komunikasi Politik Dan Paradigma Komunikasi Politik.....	
.....	17
6. Pengertian Pemilihan Umum	
.....	24
B. Kajian Teori	
.....	42
C. Kerangka Pikir	
.....	42

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	
.....	47
B. Lokasi Penelitian	
.....	47

C. Informasi Penelitian	48
D. Lokasi Penelitian	49
E. Instrument Penelitian	50
F. Jenis Dan Sumber Penelitian.....	51
G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
H. Teknik Analisi Data	53
I. Teknik Keapsahan Data	55
BAB IV KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umun Wilayah Penelitian.....	57
BAB V PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMPENGARUHI POLA PRILAKU MASYARAKAT TERHADAP PROSES POLITIK PILKADA DI KABUPATEN PINRANG	63
A. Sebagai Alat Komunikasi Politik.....	63

B. Sebagai Alat Informasi Politik	66
C. Sebagai Alat Kontrol dan Penyaluran Aspirasi.....	68
BAB VI DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PROSES POLITIK PILKADA DI KABUPATEN PINRANG	71
A. Dampak Positif Penggunaan Media Politik	72
B. Dampak Negatif penggunaan media politik.....	75
BAB VII PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	
.....	49
Tabel 4.1 Jumlah Anggota DPRD Kab. Pinrang	
.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	44
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa (*Mass Media*) singkatan dari media komunikasi massa (*Mass Communication Media*), yaitu sarana, *channel*, atau media untuk berkomunikasi kepada publik.¹Dimasa modern ini bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia menggunakan media massa. Bahkan kehidupan masyarakat masa kini terutama masyarakat perkotaan tidak bisa dilepaskan dari peran media massa. Peran media massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi. Media massa pada saat ini sudah berkembang dengan pesat, banyaknya pengaruh yang dapat dirasakan dari keberadaan media massa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh media massa.

Kebebasan media massa saat ini tidak serta merta terjadi begitu saja. Di Indonesia sendiri terjadi fase dimana media massa mengalami keterpurukan atas intimidasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kebebasan yang sangat amat terbatas, yang membuat media di Indonesia tidak bisa dengan gamblang memberitakan segala hal kepada masyarakat. Politik di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh peran media masa. Kini media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik. Hubungan antar media dan politik dapat dilihat sebagai suatu hal yang sangat menarik, terutama ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang memberitakan. Pada dasarnya media massa

dijadikan alat sebagai komunikasi politik. Komunikasi ini berupa penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain, melalui penggunaan simbolkata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya. Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik. Konsekuensinya, pendekatan analisis yang digunakannyapun pada gilirannya lebih banyak menggunakan analisis media massa, terutama berkaitan dengan teori-teori hubungan antara media dan masyarakat, seperti teori tentang pesan, mekanisme penyebaran informasi yang terjadi, serta efek-efek psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya.

Dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Berdasarkan kajian psikologi, norma dan pengaruh interpersonal memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang . Hal ini jugalah yang kemudian dimanfaatkan oleh media ketika melakukan kegiatan propaganda. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat.

Selain itu, konsep mediated others juga digunakan dalam melakukan propaganda melalui media. Media seringkali menampilkan endorser atau model untuk memperkuat pesan-pesan yang disampaikannya. Endorser ini bisa berupa orang-orang biasa untuk merepresentasikan masyarakat pada umumnya atau orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat untuk dijadikan opinion leader agar dapat mempengaruhi persepsi khalayak. Teknik endorser merupakan teknik

persuasif populer yang sudah banyak digunakan, khususnya dalam dunia periklanan. Dalam kaitannya dengan propaganda, teknik ini juga banyak digunakan karena dapat mempengaruhi sisi psikis khalayak.

Media massa menjadi sangat efektif untuk melakukan propaganda karena media massa memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat yang tinggi. Media massa dapat digunakan untuk self marketing melalui berita dan informasi yang disiarkan, misalnya pada waktu kampanye politik. Melalui informasi-informasi di media sebelumnya telah dikonstruksi, masyarakat pada akhirnya akan terpengaruh oleh berita-berita tersebut dan mengikuti kehendak si pembuat medianya itu sendiri.

Media massa menentukan agenda publik, dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat . Asumsi tersebut makin memperkuat pandangan bahwa media massa memang digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih dari itu, media massa juga menentukan agenda publik dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat berhasil mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tersebut.

Sementara itu, fungsi media sebagai media informasi terlihat jelas pada saat terjadi krisis. Media massa menjadi alat penting dalam penyebaran informasi dan mengingatkan masyarakat akan kejadian-kejadian tertentu . Oleh karena itu, rating berita meningkat pada saat terjadi krisis karena setiap orang mengakses

media untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi tentang krisis yang sedang berlangsung.

Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, kekuatan media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi khalayak dan akan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu. Meskipun pada saat krisis media cenderung memiliki sumber-sumber berita yang terbatas, hal itu tetap tidak menutup kemungkinan akan dijadikannya media sebagai alat propaganda pada saat krisis berlangsung.

Ketika suatu komunitas membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik, maka peranan media massa tidak dapat diabaikan. Sebagai media pesan politik, media massa mampu mempengaruhi pembentukan struktur sosial maupun partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis.

Begitu besar pengaruh dan peran media dalam perpolitikan, hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana. Terkadang seorang tokoh atau pihak tertentu yang masih bermasalah di masa silam atau kini nampak begitu kemilau dan tiba-tiba bersih sehingga masyarakat pun lengah dengan kepahitan yang pernah ada. Terus berputar pada masa lampau juga tidak akan mencerahkan bangsa ini, namun melupakan masa lalu juga bukan syarat bagi perbaikan diri, terlebih suatu bangsa.

Kontrol masyarakat untuk selalu melihat segala sesuatu dengan proposional, kritis dan obyektif sangat lah diperlukan. Hendaknya media juga mendorong masyarakat untuk melakukan *critical control*, sehingga terjalin kerjasama yang benar-benar secara positif membawa manfaat dan kontribusi bagi kedua belah pihak : pihak media massa dan terutama, pihak masyarakat.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa konstruksi sosial media massa mampu membentuk realitas masyarakat. Realitas tersebut yang direkonstruksi media massa menjadi realitas media. Perilaku politik masyarakat, tentunya dilakukan melalui intensitas pemberitaan media yang mewarnai dinamisasi komunikasi politik, terutama melalui pemberitaan media serta iklan politik yang berkontribusi nyata dalam proses pendewasaan dan sikap kritis masyarakat

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran media massa dalam mempengaruhi pola perilaku masyarakat terhadap proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang.
2. Bagaimanakah dampak penggunaan media massa dalam proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran media massa dalam mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam proses politik pilkada di kabupaten pinrang

2. Untuk mengetahui dampak penggunaan media massa dalam proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitiaan ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran dan efektivitas penggunaan media massa pada proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang (suatu tinjauan sosiologis)
 - b. Dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori penelitian pendidikan sosiologi pada umumnya,serta teori dan konsep pendidikan pada khususnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu supaya masyarakat mengetahui peran media dalam perpolitikan ,Sehingga masyarakat dapat melihat sesuatu dengan proporsional,kritis dan obyektif di Kabupaten Pinrang
 - b. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Pinrang terkait peran media massa pada proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang
 - c. Serta bagi peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran terkait efektivitas penggunaan media massa pada proses politik di kabupaten Pinrang (suatu tinjauan sosiologis)

E. Defenisi Operasional

1. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.
2. Media massa (*Mass Media*) singkatan dari media komunikasi massa (*Mass Communication Media*), yaitu sarana, *channel*, atau media untuk berkomunikasi kepada publik.
3. politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
4. Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang di uraikan dalam penelitian ini pada dasarnya di jadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini. sehubungan dengan masalah yang akan di teliti , kerangka teori yang di anggap relevan dengan penelitian ini di uraikan sebagai berikut

1. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut

H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handyaningrat, 1990, hal 15)

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

2. Pengertian Efektivitas

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000:23-36) dalam Ali Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

- a. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
- d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan

penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

- e. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan

sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-matahasil atau tujuan yang dikehendaki.

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan”(Moenir, 2006:166). Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam rsifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan *input*.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
(Gibson, 1996:34)

Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu :

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;

4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
5. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
6. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
7. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
8. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
9. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
10. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
11. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan; (Steers, 1985:46-48).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang

kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

4. Media Massa

Sejarah lahirnya media massa erat hubungannya dengan munculnya kajian komunikasi massa. Media massa berasal dari bahasa latin "medium", berarti saluran atau imtuk menyalurkan sementara massa adalah suatu kumpulan pendengar atau penonton yang besar pada umumnya tidak ada organisasinya, yang ada hanya persamaan jiwanya pada tingkatan rendah. Media massa sangat melekat dengan komunikasi massa karena berfungsi sebagai saluran dari komunikasi. Sedangkan komunikasi massa itu sendiri adalah salah satu jenis komunikasi pada umumnya.

Istilah komunikasi massa kadang-kadang telah diberikan defenisi di dalam dua cara, yakni komunikasi melalui media dan komunikasi untuk umum. Namun demikian, komunikasi massa tidak berarti komunikasi yang pesan-pesannya diterima setiap orang. Media cenderung menyeleksi khalayak dan sebaliknya, khalayak juga menyeleksi diantara dan didalam media (Achmad, 1992:81).

Berdasarkan pandangan di atas, dapat diartikan bahwa media massa adalah alat untuk mediator untuk berkomunikasi dengan khalayak / masyarakat dalam ilmu komunikasi, media massa diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan massa yaitu pers (surat kabar dan majalah), radio, film (termasuk video) dan televisi (Arifin, 1997:39).

Seperti yang dikemukakan oleh A.S. Achmad (1992:10), bahwa media massa adalah alat, instrument komunikasi yang memungkinkan kita untuk

merekam serta mengirim informasi dan pengalaman dengan cepat kepada khalayak luas, terpencar-pencar dan heterogen.

Perkembangan media massa mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga media terbagi atas dua bagian. Pertama, media massa cetak termasuk surat kabar, majalah, jurnal serta buku-buku. Kedua media massa elektronik termasuk radio, televisi dan film.

Meskipun terbagi dua (media cetak dan elektronik) namun tetap mempunyai fungsi yang sama sebagai media informasi, hiburan dan pendidikan. Sasaran akhir yang hendak dicapai media massa adalah efek atau pengaruh bagi khalayak, dalam media massa dapat diartikan sebagai perilaku. Dengan demikian media massa dapat diartikan sebagai perpanjangan alat indra sebab dengan media massa dapat diperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang tidak dialami secara langsung.

1. Fungsi Media Massa

Informasi yang disajikan kepada khalayak sangat bervariasi, dengan harapan tentunya dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari hiburan, pendidikan, berita-berita yang faktual. Pesan-pesan pembangunan dan lain-lain dikemas dengan apik dan semarak mungkin untuk melayani segala lapisan masyarakat. Dalam hal ini, media massa melainkan fungsi-fungsi yang telah diembannya.

Menurut A.S. Ahmad (1992) media massa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : Pertama, media massa yang memberitahukan dan membantu kita untuk mengalami dunia, dalam hal ini media massa melakukan fungsi

pengawasan. Kedua, media massa mengatur agenda kita dan membantu menyusun kehidupan kita. Ketiga, media massa membantu kita untuk berhubungan dengan bermacam-macam kelompok atau golongan dalam masyarakat. Keempat, media massa membantu kita untuk mensosialisasikan. Melalui media massa kita menambah apa yang sudah dipelajari mengenai perilaku dan nilai-nilai di dalam mengajak kita dan meniatkan sumber-sumber pesan. Keenam, media adalah untuk menghibur. Sedangkan menurut Ardial (2009: 162), media massa memiliki 6 fungsi sosial yang berkaitan dengan politik, yaitu :

a. Fungsi informasi

Media massa sejak awalnya sebenarnya melakukan tugas mengumpulkan kemudian membagi informasi yang diinginkan masyarakat pada umumnya.

b. Fungsi hiburan

Media massa merupakan tempat yang dapat memberikan hiburan atau rasa senang kepada pembacanya atau khalayaknya.

c. Fungsi menghubungkan

Media massa berfungsi membantu untuk berhubungan dengan berbagai kelompok masyarakat lain di luar masyarakat kita.

d. Fungsi kontrol sosial

Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (social control). Yang dikontrol

bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer tetapi juga hal di dalam masyarakat itu sendiri.

e. Fungsi mendidik

Media massa sebagai sarana pendidikan. Lewat pemberitaannya, pers mencoba member pencerahan, mencerdaskan dan meluaskan wawasan khalayak perabaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.

f. Fungsi membentuk pendapat umum

Adanya pendapat umum dengan snowball effect akan sangat mungkin mendorong sikap dan perilaku khalayak terhadap isu politik tertentu. Proses pendapat umum ini biasanya dimulai dengan pemuatan berita yang memiliki nilai dan sifatnya kritikan dengan kepentingan masyarakat (atau juga controversial).

Dukungan media atas aktivitas politik, tidak hanya didasarkan pada asumsi besarnya peristiwa politik, tetapi juga nilai politik dari peristiwa tersebut. Nilai politik ini terutama berkaitan dengan kepentingan media itu sendiri dan kepentingan masyarakat sebagai konsumen atau publik dari media tersebut.

Suatu peristiwa politik akan sangat mungkin di tanggap dengan cara yang berbeda oleh berbagai media, antara lain dengan peletakan berita, volume berita dan teknik kecenderungan pemberitaannya, dimana isi media mengenai peristiwa

tersebut sangat mungkin mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh khalayak media yang berbeda.

Dengan demikian, dalam proses komunikasi politik peran media menjadi sangat penting. Peran tersebut tidak hanya dalam konteks pendistribusian pesan umum, tetapi jauh lebih penting adalah nilai berita yang akan diterima oleh khalayak.

5. Komunikasi Politik dan Paradigma Komunikasi Politik

a. Komunikasi Politik

Dan Nimmo dalam Jalaluddin Rakhmat (1989:6) mengatakan bahwa: dalam Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media, menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.

Sedangkan pengertian politik dalam Wikipedia menyebutkan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Kajian komunikasi politik bersifat spesifik karena bahasan terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup didalamnya. Secara filosofi kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia

untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara.

Komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah” (Dan Nimmo.1989).

b. Paradigma Komunikasi Politik

Ilmuwan politik Harold Lasswell, mengemukakan bahwa cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, Who (siapa ?), Says What (mengatakan apa ?), To Whom (kepada siapa ?), With What Channel (dengan saluran apa ?), With What Effect (dengan akibat apa ?). Pertanyaan tersebut diatas mengidentifikasi unsur-unsur atau komponen-komponen yang biasa terdapat pada komunikasi, yaitu sumber atau komunikator, penerima (komunikan), pesan (message), saluran (channel) dan tanggapan atau efek. Baik diuraikan dalam teori pengalihan informasi yang sangat canggih, maupun dalam pandangan sosiopsikologis yang provokatif, kelima dasar Lasswell ini menyajikan cara yang berguna untuk menganalisis komunikasi (Dan Nimmo, 1993:13). Meskipun demikian, memang rumus Lasswell bila digunakan sebagaimana adanya, agak terlalu sederhana untuk mengorganisasi pembicaraan mengenai komunikasi politik dan opini publik. Namun kiranya dengan sedikit memodifikasi, paradigma ini sudah memadai sebagai rujukan

untuk membahas komunikasi politik. Siapa komunikator politik, mengatakan apa dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa akan dibahas satu persatu setelah uraian apa itu komunikasi politik.

Kerangka yang diberikan ilmuwan komunikasi bagi komunikasi politik adalah sebagaimana digambarkan dalam paradigma Laswell : siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi dan berlaku inheren dalam komunikasi politik. Walaupun dipandang sangat "berbau" mekanistik dan karenanya berimplikasi simplistik dan linier, kemiripan ini berjasa untuk menelaah komunikasi politik lebih lanjut.

Nimmo (2000:8), melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi.

Pendapat ini diperkuat oleh Almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Gahioor menyebutkan

bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Arifin, 2003:9).

Dari deskripsi di atas, komunikasi politik memusatkan kajiannya kepada materi atau pesan yang berbobot politik yang mencakup di dalamnya masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan. Hal ini bisa diperkuat oleh pendapat Sumarno (1993:3) yang mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik.

Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik.

c. Kampanye Politik

Kampanye politik adalah bagian dari demokrasi. Kampanye politik merupakan alat (instrument) yang sah dimana kelompok kepentingan politik berupaya untuk menjelaskan akan kebenaran maksud dan tujuannya kepada masyarakat. Kampanye politik yang sah adalah kampanye politik yang mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu merupakan fondasi dalam kebebasan individu. Kampanye politik merupakan suatu usaha yang terkelola secara terorganisasi dan terstruktur serta menjadi tahapan seseorang dicalonkan, dipilih atau dipilih kembali dalam sebuah jabatan politik.

Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik merupakan cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi guna menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan mereka. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa kampanye politiklah salah satu tahapan yang cukup menentukan hasil dalam sebuah pemilihan, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

Merujuk pada peraturan pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 tentang penyelenggaraan pemilu, kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum, kampanye diselenggarakan diseluruh daerah yang menyelenggarakan pemilu. Kegiatan kampanye dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon.

Dalam proses pemilihan kepala daerah, kampanye politik bertolak

belakang dari konsep maknanya (meanings). Pada dasarnya kampanye politik diartikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang terencana, strategis dan taktis, untuk menyebarkan makan politik kepada para pemilih dan membentuk serta menanamkan harapan, sikap keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Selain itu, kampanye politik dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memasarkan ide-ide atau gagasan utama setiap pasangan calon atau disebut juga produk politik kepada masyarakat, produk yang dimaksud disini adalah :

- a. Policy adalah tawaran program kerja jika pasangan calon tersebut kelak terpilih. Policy merupakan solusi yang ditawarkan kontestan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih. Policy yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yaitu : (1) menarik perhatian, (2) mudah terserap pemilih, (3) atribut.
- b. Person adalah kandidat yang akan dipilih melalui pemilu. Kualitas person dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni : (1) kualitasinstrumental, (2) dimensi simbolis dan fenotipe optic dan (3) dimensi kualitas.
- c. Party dapat juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai mempunyai identitas utama, asset reputasi, dan identitas estetik. Ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemilih. Oleh karena itu unsur-unsur ini harus dikelola dengan baik.
- d. Presentation adalah bagaimana ketiga substansi produk politik (policy person, party) disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat

mempengaruhi makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih.

Secara garis besarnya bahwa makna politis yang akhirnya tertanam dalam benak pemilih merupakan hasil dari interaksi dua faktor. Pertama adalah kualitas dan kuantitas dari stimulus politik itu sendiri. Kedua adalah rujukan kognitif berupa kesadaran atau alam pikiran seseorang yang memaknainya.

Apapun ragam dan tujuannya, upaya yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavioral) yaitu:

- a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap isu tertentu.
- b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- c. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Tindakan kampanye politik yang persuasif menjadi titik tolak kampanye, ada beberapa macam teori kampanye, namun secara ringkas Klingeman dan Romellan (2002) membedakan kampanye ke dalam kampanye informatif dan

kampanye komunikatif. Kampanye informatif dilakukan secara satu arah dimana pesan-pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber kepada para penerima kampanye, tidak terjadi dialog antara pelaku dan penerima kampanye.

Pelaku kampanye sepenuhnya mengandalkan media massa, iklan, baliho dan lainnya sebagai media perantara untuk menyalurkan pesan-pesannya. Sedangkan kampanye komunikatif lebih berorientasi kepada khalayak dan menekankan pada pentingnya interaksi dan dialog khalayak sasaran.

Memberikan suara adalah salah satu tindakan terakhir dalam kampanye pemilihan, suatu rangkaian pertukaran yang panjang dan kadang-kadang memanas membentuk proses komunikasi. Dalam memahami ciri dasar kampanye politik sebagai proses komunikasi dengan melihat kembali perspektif dasar kita tentang kegiatan manusia.

6. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada

gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara 22 Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama,

suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat 23 suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

a. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2. Perbandingan Model Pemilihan Umum

a. Model Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di

kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem Single Non Transferable Vote.

Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent 26 yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara

Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

b. Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- 3) Tidak pernah mengkhianati negara.
- 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- 5) Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
- 6) Terdaftar sebagai pemilih.
- 7) Belum pernah mencabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 8) Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- 9) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.

10) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU (komisi pemilihan umum). dan daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan calon wajib mempunyai rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU. Dan sumbangan dana kampanye dari perorangan tidak boleh melebihi Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemungutan suara di bagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu : Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Nomor urut pasangan calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian. Dan untuk bagian kedua Pemungutan suara di

TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara.

Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden.

Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden.

c. Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

- 1) Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
- 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
- 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan
- 4) Akuntabilitas publik.

Dibawah ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut, secara lebih terperinci dan jelas

1) Pemilihan Umum.

Rekrutmen jabatan politik atau publik dan adiharus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau human (*reward and punishment*) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

2) Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya, kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis.

Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

3) Rekrutmen Terbuka.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan dalam peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

4) Akuntabilitas Publik.

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik.

Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan

kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.

Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipisial, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam recruitment politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A.Dahl, disamping untuk menghindari Tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, diantaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya kesejahteraan. Pilkada secara langsung itu member kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.

3. Pemilihan Umum Raya Model Partai Politik

Dewasa ini sangat jarang menemukan Partai Politik untuk menentukan calon yang akan di usung untuk menjadi Calon Presiden melalui sistem pemilihan secara langsung, yang sering kita temui yaitu Ketua Partai Politik atau atas putusan Ketua Partai politik tersebut. Namun ada salah satu Partai Politik yang

masih menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh kader-kader Partai Politik tersebut yaitu Partai Kesejahteraan Sosial yang bernama Pemilihan Umum Raya atau PEMIRA

Melalui PEMIRA, calon dari luar partaipun bisa ikut, jika memang parpol yang bersangkutan membuka peluang itu. "Dengan demikian keinginan mereka yang non parpol bisa menjadi capres terpenuhi dan tetap sesuai Konstitusi," Pemira PKS diikuti oleh kader yang memiliki kartu anggota, bukan sekadar pendukung atau simpatisan.

Dalam pemilihan, setiap pemilik suara harus memilih 5 dari 22 tokoh PKS yang dicalonkan, bukan memilih satu nama seperti pemilihan biasa. Karena itu, pemenang Pemira ini juga bukan satu. Panitia nanti akan mengambil lima kandidat. Kelima nama ini kemudian diserahkan ke Majelis Syuru untuk dipilih satu orang yang bakal diusung. "Yang menetapkan siapa yang menjadi capres adalah Majelis Syuro". Seharusnya semua Partai Politik bisa menerapkan sistem Pemilihan Umum Raya ini. Karena dengan sistem ini, setiap capres yang nantinya di usung setiap Partai Politik itu adalah orang yang memang benar-benar pantas dan sudah teruji karena sudah melalui beberapa tahapan yang *obyektif* untuk maju dalam pemilihan presiden.

4. Teori Tentang Partisipasi Pemilih

Diakses dari laman web tanggal 21 Juni 2016 00.58.00 dari:
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-partisipasi-politik.html>

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara- negara berkembang. Pada awalnya

studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan- keputusan mengena-mengenai kebijakan umum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti, sebagai berikut :

- a. Partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
- b. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan *alternative* kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- c. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

- d. Kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.
- e. Mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kideta, revolusi, dll.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, menagjukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

- b. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput). Kategori partisipasi politik menurut Milbrath adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Gladiator meliputi:
 - 1) Memegang jabatan publik atau partai
 - 2) Menjadi calon pejabat
 - 3) Menghimpun dana politik
 - 4) Menjadi anggota aktif suatu partai
 - 5) Menyisihkan waktu untuk kampanye politik.
- b. Kegiatan transisi meliputi :
 - 1) Mengikuti rapat atau pawai politik
 - 2) Memberi dukungan dana partai atau calon
 - 3) Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik
- c. Kegiatan monoton meliputi :
 - 1) Memakai symbol/identitas partai/organisasi politik
 - 2) Mengajak orang untuk memilih
 - 3) Menyelenggarakan diskusi politik

4) Memberi suara

d. Kegiatan apatis/ masa bodoh.

Menurut Luis Rey, apatis merupakan kata yang mengacu pada istilah kejiwaan dengan definisi seorang individu yang ditandai dengan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, atau ketidakpekaan terhadap peristiwa, kurangnya minat, atau keinginan. Tampak jelas bahwa apatis dalam kosakata medis juga berasal dari konsep kata estoicista filosofis.

Adapun dari sisi psikologis, apatis bisa disebut sebagai keadaan ketidakpedulian ketika seorang individu tidak menanggapi rangsangan kehidupan emosional, sosial, atau fisik. Apatis depresi klinis dianggap tingkat yang lebih moderat dan didiagnosis sebagai gangguan identitas disosiatif dalam tingkat ekstrem. Aspek fisik apatis dikaitkan dengan kelelahan fisik, kelemahan otot, dan kekurangan energi yang disebut letargi.

Ada beberapa penyebab apatis muncul dalam diri masing-masing individu, di antaranya matinya nilai-nilai di masyarakat, matinya rasa kepedulian, hilangnya respek atau nurani, serta pandangan tentang keadilan yang membutuhkan masyarakat akan hukum. Tindakan apatis ini sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik, dan juga kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
3. Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

B. Kajian Teori

Susbtansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi sekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah transisi-modern di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, dimana media massa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Dengan demikian Berger dan Luckmann tidak memasukan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas

realitas Peter L. Berger dan Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subyektivasi, dan internalisasi inilah yang kemudian dikenal sebagai “konstruksi sosial media massa”. Substansi dari konstruksi sosial media massa ini adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis

C. Kerangka Pikir

Istilah ‘media massa’ memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang bekerja dalam berbagai skala, mulai dari skala terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan siapa saja di masyarakat, dengan skala yang sangat luas. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet dll. Internet adalah salah satu media baru yang bersifat individual, lebih beragam (*diversified*) dan lebih interaktif.

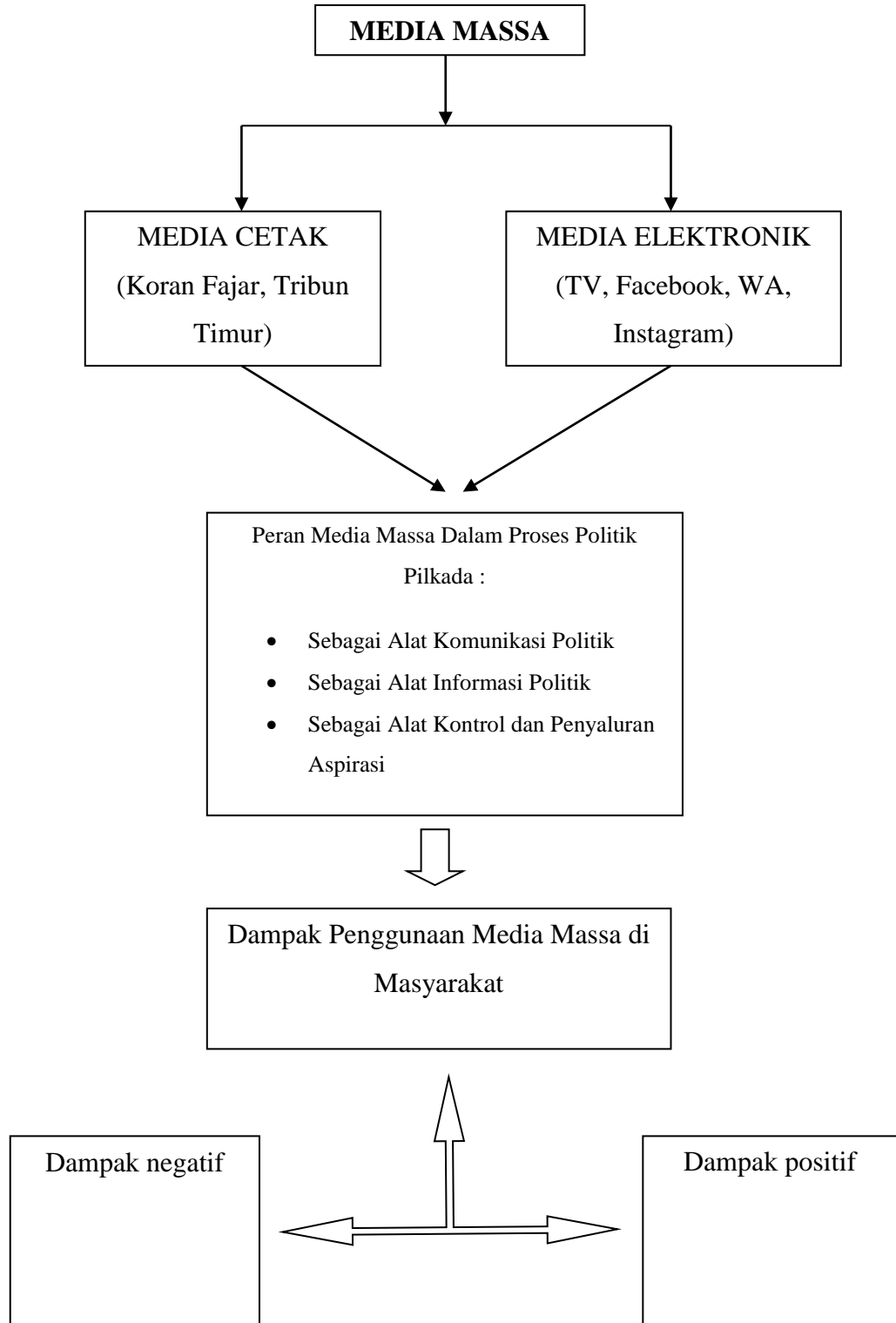
Walaupun media baru menunjukkan pertumbuhan yang cepat, namun belum terlihat tanda-tanda bahwa media massa ‘lama’ akan berkurang peranannya dibandingkan sebelumnya. Peranannya tetap bertahan dengan cara terus menerus menambah kemampuannya dalam upaya menghadapi media baru.

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki sifat dan karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas (*universality of reach*), ber sifat publik dan mampu memberikan popularitas

kepada siapa saja yang muncul di media massa. Karakteristik media tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya masyarakat kontemporer dewasa ini. Dari perspektif politik, media massa telah menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi karena menyediakan arena saluran bagi debat publik, menjadikan calon pemimpin politik dikenal masyarakat dan juga berperan menyebarkan berbagai informasi dan pendapat

Pengaruh yang ditimbulkan media massa telah menumbuhkan perkembangan dan pembaharuan yang cepat dalam masyarakat. Pembaharuan yang berwujud perubahan ada yang ke arah positif dan ada yang ke arah negatif. Pengaruh media tersebut berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti komunikator, isi pesan dari media itu sendiri serta tanggapan dari masyarakat.

KERANGKA PIKIR



Deskripsi :

Politik dan Media merupakan dua hal yang tidak di pisahkan dalam konteks kekinian masyarakat saat ini, keduanya bagaimana dua mata rantai organism yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kehadiran media saat ini baik itu media elektronik maupun media cetak telah memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, khusus dalam konteks politik di kabupaten Pinrang yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku social politik masyarakat di kabupaten Pinrang. Ada beberapa media yang cukup banyak menjadi konsumsi masyarakat di kabupaten Pinrang, media cetak seperti Koran Fajar dan Tribun. Di masyarakat kabupaten Pinrang Koran ini menjadi begitu familiar dikalangan masyarakat dan beritanya cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat, dan bukan hanya media cetak melainkan media elektronik pun tak kalah dalam hal penggunaannya khususnya masyarakat di kabupaten Pinrang.

Kemajuan informasi dan teknologi dewasa ini banyak mengubah perilaku social masyarakat kini, yang dimana teknologi telah menjadi teman sejati individu maupun kelompok dalam aktifitas kehidupannya. Media elektronik tidak hanya dalam hal saling menyapa dan berhubungan antara satu dengan yang lain tetapi penggunaannya pun menjadi lebih meluas bahkan pada ranah politik. Di kabupaten Pinrang sendiri penggunaan media social seperti Facebook, WA, Instagram telah menjadi media social yang begitu digandrungi dalam hal komunikasi individu dan masyarakat. Bahkan penggunaannya dewasa ini telah sampai pada ranah-ranah politik di kabupaten Pinrang. Kehadiran media elektronik seperti Facebook, WA, Instagram secara tidak langsung mengubah perilaku social politik dalam

masyarakat di kabupaten Pinrang itu sendiri yang seakan menjadi alat kampanye individu yang mendukung salah satu calon bahkan sampai alat untuk menyebarkan isu SARA dalam masyarakat di kabupaten Pinrang yang di mana untuk menjatuhkan salah satu kandidat dalam suatu pemilihan.

Tidak dipungkiri bahkan kehadiran dewasa ini telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Pinrang tetapi juga seakan menjadi sebuah momok yang begitu menakutkan ditengah kehidupan masyarakat di kabupaten Pinrang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menghasilkan data-data *deskriptif* berupa kata-kata yang berbentuk tulisan atau lisan dari individu atau kelompok. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas. Dimana menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, dan observasi.

Strauss dan Corbin (2003) dalam Andi Munarfah, M dan Muhammad Hasan (2009 : 183) bahwa penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yaitu tempat, yang berarti letak atau posisi. Pada bagian ini tempat penelitian tersebut dilakukan.

Lokasi penelitian ini yang mengkaji efektivitas penggunaan media massa pada proses politik pilkada (suatu tinjauan sosiologis) di Kabupaten Pinrang.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Jadi syaratnya, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang lokasi penelitian. Sedangkan kewajibannya adalah secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Kegunaan informan bagi penelitian adalah:

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
2. Agar dalam waktu relative singkat banyak informasi yang terkumpul sebagai sampling informal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan sesuatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya dapat dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perekrutan informan, yaitu sebaiknya merekrut informan seperlunya dan diberitahu tentang maksud dan tujuan penelitian..

a. Kriteria Informan

- 1) Masyarakat Pinrang
- 2) Usia minimal 21-51 tahun

b. Jumlah Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 orang.

Adapun daftar informan yang menjadi sasaran peneliti yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Muh. Zainal Arifin	28	Pengurus DPD Partai Gerindra Pinrang
2	Mursalim S.Pd	42	Sekretaris Camat Lembang
3	Hj. Masniah S,Pd.,M.Pd	53	Guru SDN 186 Pinrang
4	Herianto	29	Wartawan Tribun
5	Taufik Akbar S. Sos	38	Stap Badan Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Pinrang
6	Trigosali riadi	29	Pegawai honorer discapil pinrang

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Purposive sampling atau *judgemental sumpling*, yaitu penarikan informan secara purposive merupakan cara penarikan informan yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

D. Lokasi Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus

penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah.

Dalam menentukan fokus, ada beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus fleksibel, yaitu masalah tersebut dapat diteliti, dan dapat dilakukan dengan cara yang efisien.
- 2) Harus jelas, yaitu bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama sesuai dengan rumusan masalah tersebut.
- 3) Harus signifikan, yaitu bahwa hasil kajian tersebut member kontribusi yang riil terhadap pengembangan ilmu, masalah kemanusiaan lain/ perumusan kebijakan.

Fokus penelitian terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan hal inti yang akan diteliti. Hal inti yang dimaksud terdapat judul penelitian yang ditawarkan oleh peneliti.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengkaji efektivitas penggunaan media massa pada proses pilkada di Kabupaten Pinrang (suatu tinjauan sosiologis) dan dampak media massa dalam mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam proses Politik pilkada di Kabupaten Pinrang

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk keperluan dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto 2010, instrument penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, lembar observasi, angket dan peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *Human Instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder, data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi sedangkan sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi. Sumber data terdiri dari sumber informan kunci, informan ahli dan informan biasa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancari.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan

jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, tape recorder, dan lain sebagainya. Namun dalam melakukan pengamatan, pengamat (peneliti) harus mempunyai konsep lebih dulu yaitu konsep tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk diamati, bagian-bagian mana yang diperlukan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang dapat dipakai untuk melengkapi data yang dapat diperoleh melalui observasi. Jika peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam penelitian, perlu diketahui lebih dulu sasaran, maksud, dan masalah apa yang dibutuhkan, sebab dalam suatu wawancara dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud peneliti.

Waktu mempersiapkan wawancara dengan responden perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Responden yang akan diwawancarai sebaiknya diseleksi agar sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- b. Waktu berwawancara sedapatnya dilakukan sesuai dengan kesediaan responden.
- c. Permulaan wawancara sebaiknya peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan wawancara dilakukan.
- d. Sedang berwawancara peneliti sebaiknya berlaku seperti orang ingin tahu dan belajar dari responden dan jangan seperti orang yang mengguru-gurui terhadap responden. Hal ini penting untuk kelancaran wawancara.
- e. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang tak diinginkan oleh responden.
- f. Peneliti sebaiknya menunjukkan perhatian penuh terhadap pembicaraan responden, kalau terjadi pengalihan pembicaraan oleh responden, peneliti dengan hati-hati meluruskan ke sasaran pokoknya.
- g. Melakukan penutupan pembicaraan, ucapan terima kasih.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Semua data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dengan

melakukan pengolahan data dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasi, kemudian diuraikan dalam bentuk penjelasan untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

Dari semua data serta informasi yang telah peneliti dapatkan dari hasil penelitian tersebut akan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran informasi yang jelas dan mendalam sebagai metode penelitian studi kasus. Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Analisis Interaktif* yang mencakup tiga kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Proses ini berlangsung selama dilakukan penelitian, dari awal hingga akhir.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, network (jejaring kerja), dan bagan.

3. Menarik kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik yang digunakan untuk meyakinkan public/masyarakat/audiens mengenai data yang didapatkan dapat dipercaya atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga peneliti dapat berhati-hati dalam memasukkan data hasil penelitian, data yang dimasukkan adalah data yang sudah melalui berbagai tahapan keabsahan data.

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta actual di lapangan.

Triangulasi sumber data menguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data cek and ricek dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari data sumber meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber daya tersebut harus setara sederajat, kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber adalah untuk menguji sumber data tersebut.

2. Trianggulasi tehnik, adalah untuk menguji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan tehnik observasi, maka di lakukan lagi tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan tehnik dokumentasi.
3. Trianggulasi waktu, adalah untuk melakukan pengecekan data dengan cara wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti yang awalnya melakukan pengumpulan data pada waktu pagi hari dan data yang didapat, tetapi mungkin saja pada waktu pagi hari tersebut kurang tepat karena mungkin informasi dalam keadaan sibuk. Kemudian dilakukan lagi pengumpulan data pada waktu malam hari data pun didapat dan mungkin saja informasi sedang istirahat dapat melengkapi dan mengecek atas kebenaran data.

BAB IV

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Pinrang

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama **Pinrang** yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri :

Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti “air genangan” bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama **La Paletang**, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan *To barani pole' Kassa* disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*”, yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi Pinrang.

Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto pada waktu pemerintahan La Paletang Raja IV, di Kerajaan Sawitto, Sulawesi. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa. Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar,

berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antara Sawitto dan Gowa sekitar tahun 1540.

Prajurit-prajurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati-matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahan dengan kekalahan dipihak Sawitto sehingga raja La Paleteang dan isterinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana. Berbagai dilakukan membebaskan sang raja bersama permaisuri kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam suatu musyawarah kerajaan terpilih dua Tobarani, yaitu Tolengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurnya. Kedatangan raja bersama permaisuri disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. Dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan “PINRA KANA NI TAPPA NA DATUE POLE RI GOWA”, yang artinya wajah raja mengalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama PINRA.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa Bugis disebut “PINRA-PINRA ONROANG”. Setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: PINRA-PINRA.

Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu “PINRA”, kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Pinrang Tahun 2018 adalah 348.174 Jiwa terdiri dari laki-laki 168.201 Jiwa (48,31%) dan Perempuan 179.973 Jiwa (51,69%), dengan kepadatan penduduk rata-rata 166,95 Jiwa/km² sedang penduduk produktif 196.132 jiwa (59,88%), tidak produktif 131.384 jiwa (20,12%).

3. Mata Pencarian

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari atas sektor Pertanian yaitu :

Petani : 62.198 Kk (68,61%)

Petani Nelayan : 9.450 Kk (10,42%)

Peternak : 4.745 Kk (5,23%)

Pedagang/Pengusaha : 11.576 Kk (12,76%)

Jasa : 1.664 Kk (1,83%)

Dan lainnya : 1.019 Kk (1,12%)

4. Letak Geografis Dan Topografi

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan yang letaknya berada di bagian Barat Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah utara dari Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan berada pada posisi letak geografis yaitu LS 4010'30" - 30019'13" BT 119026'30" – 119047'20".

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196.177 Ha atau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kab. Toraja
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kab.Enrekang dan Sidrap
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kota Pare-Pare
- Sebelah Barat Berbatasan dengan kabupaten Polewali Mandar dan Selat Makassar

a. Wilayah Administrasi

Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan meliputi 64 Desa dan 39 kelurahan.

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan.

Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0 – 500 m diatas permukaan laut (60, 41%), ketinggian 500 – 1000 m diatas permukaan laut (19,69%) dan ketinggian 1000 m diatas permukaan (9,90%)

b. Keadaan Iklim

Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh 2 musim pada satu periode yang sama, untuk wilayah kecamatan Suppa dan Lembang di pengaruhi oleh musim Sektor barat dan lebih dikenal dengan sektor peralihan dan 10 kecamatan lainnya termasuk sektor timur. Dimana puncak hujan jatuh pada Bulan April dan Oktober.

Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A dan B (Daerah basah) suhu rata-rata normal 270C dengan kelembaban uadara kurang lebih 80% sampai 85%.

c. Jenis Tanah

Kabupaten Pinrang mempunyai berbagai jenis tanah,diantaranya tanah aluvial

gromosol, regesal brown forest dan podsolik. Jenis tanah yang menempati ruang terbesar di Kabupaten Pinrang menyusul tanah Regosol dan tanah Gromosol

5. Dewan Perwakilan Rakyat

Tabel 4.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Pinrang Tahun 2014

NAMA PARTAI	JUMLAH ANGGOTA
- PARTAI NASDEM	2
- PARTAI PKB	3
- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
- PDIP	4
- PARTAI GOLKAR	5
- PARTAI GERINDRA	5
- PARTAI DEMOKRAT	5
- PARTAI AMANAT NASIONAL	2
- PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4
- PARTAI HANURA	4
- PBB	1
JUMLAH	40

Sumber: KPU

BAB V

**PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMPENGARUHI POLA
PRILAKU MASYARAKAT TERHADAP PROSES POLITIK PILKADA DI
KABUPATEN PINRANG**

Media massa (*Mass Media*) singkatan dari media komunikasi massa (*Mass Communication Media*), yaitu sarana, *channel*, atau media untuk berkomunikasi kepada publik. Dimasa modern ini bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia menggunakan media massa. Bahkan kehidupan masyarakat masa kini terutama masyarakat perkotaan maupun desa tidak bisa dilepaskan dari peran media massa. Peran media massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi. Media massa pada saat ini sudah berkembang dengan pesat, banyaknya pengaruh yang dapat dirasakan dari keberadaan media massa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh media massa.

Dalam kehidupan Sehari-hari media sudah menjadi aktivitas penunjang kehidupan Masyarakat di Kabupaten Pinrang, Bahkan dalam aktifitas politik masyarakat di kabupaten Pinrang. Adapun Peran Media Massa dalam mempengaruhi pola prilaku masyarakat terhadap proses politik :

D. Sebagai Alat Komunikasi Politik

Dalam hal kampanye, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan sebuah saluran kampanye terhadap konstituen. Apalagi

dengan arus teknologi ini, rasanya media elektronik menjadi saluran utama bagi jalan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye Pemilu. Medium ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal itu salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu menggunakan internet. Oleh karena itu banyak Partai maupun calon yang akan berkompetisi di Pemilu menggunakan sarana atau saluran kampanye melalui media elektronik khususnya televisi.

Banyak sedikitnya penayangan yang berhubungan dengan transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah Partai maupun calon yang dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu, bagi yang ingin mendapat kemenangan suara harus mampu “menguasai” media ini dengan penayangan iklannya. Tetapi tidak sedikit biaya tentunya.

Berikutnya Peneliti melakukan Wawancara dengan Muh. Zainal Arifin Selaku Informan, Beliau merupakan Pengurus Partai GERINDRA Kabupaten Pinrang Mengungkapkan :

“Di era sekarang ini dinda memang media massa menjadi alat utama dalam politik kekinian dinda,tidak kita pungkiri dinda di era sekarang ini,Media massa Menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pinrang ini, kita lihat di Kabupaten Pinrang...! Petani saja yang biasanya Memegang Cangkul kalau kesawah sekarang kalau kesawah mereka pun membawa HP untuk dibawah,untuk dengar

musik maupun cek Facebook Mereka. jadi Perkembangan teknologi terutama perkembangan Media massa begitu merasuki sumber-sumber Kehidupan social Masyarakat sekarang ini. Sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bahkan kewajiban para pelaku politik maupun politisi menjadikan media massa sebagai sularan kampanye karna sebagian masyarakatkan sudah menggunakan facebook, BBM, Iine maupun Media Cetak seperti Koran dll. dan memang prilaku social masyarakat dalam berpolitikpun berubah semenjak penggunaan media cetak dan social menjadi bagian aktifitas kehidupan masyarakat. Media mempunyai daya jangkuan luas dan cepat sehingga individu atau masyarakatpun tak pelak menggunakan media social dalam sarana aktifitas politiknya misalnya sosialisasi calon tertentu yang didukungnya.”

Senadah dengan yang di ungkapkan Bapak Herianto, beliau merupakan wartawan Tribun di Kabupaten Pinrang Mengungkapkan :

“Aktifitas politik sekarang ini di bisa lepas dari penggunaan media massa dikalangan pejabat maupun politisi, media massa seakan menjadi hal yang wajib digunakan para politisi maupun pejabat pemerintahan dalam hal sosialiasi program kerja maupun sosialisasi dalam hal pemilihan perkara daerah, jadi gaya dan trend perpolitikan sekarang memang penggunaan media massa”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Masniah, Beliau Merupakan Guru SDN 186 Pinrang :

“Sekarang media politik memang banyak digunakan oleh orang untuk kampanye sekarang Nak...! Dulu itu biasa adaji yang datang kerumah yang banyak bawah poster apa tapi sekarang itu jarang mhi, adaji tapi nda seperti mhi yang dulu, adanya media politik memang mempengaruhi prilaku politik dalam masyarakat khususnya pelaku politik maupun masyarakat di Kabupaten Pinrang”.

Media massa baik surat kabar maupun televisi berpengaruh sangat besar bagi kemenangan dalam Pemilu. Komunikasi politik lebih efektif melalui sarana tidak langsung atau menggunakan media tersebut. Karena pesan yang disampaikan akan serentak diketahui oleh orang banyak di segala penjuru dan juga dapat diulang-ulang penayangannya. Persepsi, interpretasi, maupun opini publik mudah dipengaruhi lewat iklan maupun berita dalam media.

E. Sebagai Alat Informasi Politik

Media dalam sebuah komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tentunya dengan tujuan khalayak mengetahui agenda politik setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai tersebut. Siapapun komunikator atau aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Tak heran, barang siapa yang telah menguasai media, maka dia hampir memenangi pertarungan politik. Semenjak kemajuan teknologi dan informasi yang revolusioner, media cetak maupun elektronik mengantarkan informasi kepada

khalayak sangat efektif. Pemanfaatan media untuk mendongkrak popularitas sebenarnya telah mulai marak dan bebas sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat di Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009. Segala kegiatan yang ada nuansa politik diangkat media bertujuan tak hanya sebagai sarana publisitas namun juga mempengaruhi khalayak untuk memilihnya.

Oleh sementara pihak media, media massa sering disebut sebagai *the fourth estate* dalam kehidupan sosial ekonomi. Hal ini terutama disebabkan oleh peran suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media massa dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial ekonomi dan politik masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Antara lain karena itu, media massa juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu idea atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Masniah, Beliau Merupakan Guru SDN 186 pinrang :

“ Dengan Kehadiran media elektronik (media massa) sekarang ini sangat memudahkan kita dalam mengetahui kandidat wakil bupati maupun presiden kalau ada pemilihan kehadiran media dalam hal aktifitas politik dengan mudah kita tahu siapa kandidatnya, kita langsung menonton saja atau baca surat kabar apalagi kalau buka Facebook na dilihat semua mije...! Jadi tidak

susah lagi Nak. Tidak perlu kita kesana kemari lagi cerita-cerita ke orang lain mhi, bilang siapa bagus dipilih di.

Senadah dengan yang di ungkapkan oleh Taufik Akbar S.Sos beliau merupakan stap Badan organisasi dan tata laksana SETDA PINRANG mengungkapkan :

“Media massa dalam pelaksanaan pemilu memang sangat memudahkan Masyarakat dalam bentuk informasi politik, dengan mudah masyarakat mengetahui visi-misi calon kepala daerah, dengan begitu masyarakat bisa memilih dan memilah sesuai dengan visi-misi yang baik dan benar menurut masyarakat”.

Elisabeth Noelle-Neumann adalah salah satu sarjana yang menganut konsep efek perkasa media massa. Ia menyebutkan bahwa media massa bersifat ubiquity, artinya serba ada. Media massa mampu mendominasi lingkungan informasi dan berada di mana-mana. Karena sifatnya yang serba ada, agak sulit orang menghindari pesan media massa.

F. Sebagai Alat Kontrol dan Penyaluran Aspirasi

Media massa juga berperan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, demikian pula dalam proses pilkada. Media massa menyalurkan apa yang diinginkan rakyat agar didengarkan, dimasukkan dalam misi dan diimplementasikan oleh para kandidat dalam praktik kampanye sampai jika menjadi kepala daerah.

Hadirnya media politik yang memberikan informasi politik dan penggunaan media yang media sosial di masyarakat memudahkan masyarakat melakukan kontrol politik dalam bentuk kebijakan suatu pemerintahan. Masyarakat dalam melakukan kontrol dalam bentuk protes dengan adanya saluran media

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Mursalim S.Pd beliau merupakan Sekretaris Camat Lembang, Mengungkapkan :

“Kita lihat fenomena yang ada dengan adanya media massa, kita seakan dibuat dimanjakan bahkan dalam segala hal, tidak terkecuali dalam aktifitas politik, dengan adanya media dengan mudah kita menyalurkan aspirasi kita terutama masyarakat. Apa-apa keinginan kita itu bisa kita sampaikan dan langsung dapat dilihat oleh banyak orang Nak. Terutama kandidat yang mau maju dalam pemilihan kepala daerah.

Syah Putra (2012:74) menyatakan bahwa sejak berlakunya UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, sudah tercatat sebanyak 116 3 stasiun TV lokal yang beroperasi di hampir setiap provinsi. Daftar ini diperbanyak dengan adanya 8 saluran televisi berlangganan. Televisi mampu memberikan pengaruh-pengaruh baik yang sifatnya positif maupun negatif yang kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku politik oleh anggota-anggota masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Muh. Zainal Arifin, Beliau merupakan Pengurus Paretai GERINDRA, mengungkapkan :

“Kehadiran Media massa dan penggunaannya dimasyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat di Kabupaten Pinrang ini, dengan adanya media sociall (media massa) menjadikan masyarakat lebih mudah menyampaikan inspirasinya dalam hal politik, media membuat masyarakat tidak apatis dalam hal politik, dan menjadikan masyarakat lebih aktif mengikuti perkembangan khususnya di Kabupaten Pinrang ini, dan dalam hal control pun masyarakat sangat aktif melalui saluran media”.

Kraus dan Davis dalam bukunya *The Effects of Mass Communication on Political Behaviour* menegaskan tema komunikasi politik telah dilakukan dan dipublikasikan sejak 1959, memberikan informasi bahwa media juga melakukan *konstruksi realitas* politik dalam masyarakat. Sementara itu, masyarakat pula yang akan menjadi filter terhadap berbagai pengaruh dari keberadaan materi siaran televisi. Politik sangat erat hubungannya dengan media, karena salah satu tujuan media yakni untuk membentuk perilaku mengenai berbagai hal, terutama hal politik. Ketika perilaku tersebut dapat ter ‘set’ seperti yang diinginkan media, pada saat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media. Antara dunia politik atau politik praktis dengan media terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan bahkan saling mempengaruhi.

Media massa dengan fungsi *persuasif* yang mampu membentuk perilaku politik terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Berbicara media massa sudah tidak bisa dilepaskan lagi muatanmuatan politik dan begitu juga sebaliknya, berbicara politik tidak bisa dilepaskan dari media yang memuatnya.

BAB VI

DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PROSES POLITIK PILKADA DI KABUPATEN PINRANG

Media dan masyarakat adalah dua hal yang selalu berkaitan. Sadar atau tidak sadar media massa telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media massa, menyebabkan terjadi perubahan dimana-mana. Media massa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir serta budaya perilaku masyarakat. Berbagai informasi yang disajikan media massa dinilai dapat memberi dampak yang berwujud positif dan negatif. Di era globalisasi zaman sekarang yang semua serba modern, setiap perubahan terasa sangat cepat. Mulai dari trend fashion, musik, selera makanan-minuman hingga gaya hidup masyarakat tradisional beralih menjadi gaya hidup masyarakat modern. Berbeda dengan zaman dahulu yang semua pergerakannya terasa lamban dan tidak terburu-buru. Begitu juga dengan media massa mengalami perkembangan yang sangat dirasakan hingga kini. Era dimana banyak lahir media-media baru seperti, televisi, surat kabar, radio, majalah, film dan internet.

Maka dari itu, Perkembangan komunikasi terus berkembang mengikuti perkembangan pola pikir manusia. Proses komunikasi tidak lagi berada dalam tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup yang berskala kecil dan terbatas, tetapi telah membawa manusia untuk berorientasi ke arah skala yang

lebih luas dan lebih kompleks. Betapa penting peran dan fungsi komunikasi yang selalu berdampingan dengan manusia dalam segala bidang kehidupan, sehingga mulai dirasakan perlunya pengelolaan secara bijak dan terpola terhadap semua aspek yang dimiliki komunikasi.

C. Dampak Positif Penggunaan Media Politik

Perkembangan komunikasi terus berkembang mengikuti perkembangan pola pikir manusia. Proses komunikasi tidak lagi berada dalam tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup yang berskala kecil dan terbatas, tetapi telah membawa manusia untuk berorientasi ke arah skala yang lebih luas dan lebih kompleks. Betapa penting peran dan fungsi komunikasi yang selalu berdampingan dengan manusia dalam segala bidang kehidupan, sehingga mulai dirasakan perlunya pengelolaan secara bijak dan terpola terhadap semua aspek yang dimiliki komunikasi. Secara umum fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespon sehingga adanya saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara.

Terkait dengan dampak positif penggunaan media dalam berpolitik, Peneliti melakukan wawancara dengan HJ. Masniah, Beliau merupakan Guru SDN 186 Pinrang Mengungkapkan :

“Sekarang ini Nak...! Tidak ada mi itu orang yang tidak menggunakan media massa, baik itu cetak seperti surat kabar ataupun media elektronik, terutama sekali itu elektronik, kalau dilihat memang banyak perubahan yang disebabkan oleh penggunaan tersebut, Dalam kehidupan politikpun demikian Nak, kalau saya melihat dampaknya dari positifnya itu nak efektifitas kampanye politik lebih maksimal untuk pada calon politik maupun para timsukes masing-masing kandidat. Coba liat di Koran maupun aplikasi online semuanya itu politik mhi, jadi ya kita masyarakat juga bisa muda kenal dan mengenali kalau ada calon yang mau maju. Belum itu broadcest yang masuk biasanya.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Herianto selaku informan, Beliau Merupakan Wartawan *Tribun Timur*, Mengungkapkan :

“Sekarang ini penggunaan media massa dalam berpolitik menjadi hal yang sangat urgen dalam aktifitas politik partai, calon kandidat kepala daerah dalam melakukan aktifitas politiknya kepada masyarakat, itu dikarenakan banyak kemudahan yang ditawarkan ketika kita menggunakan media dalam aktifitas politik, salah satunya jangkuan nya lebih luas dan biaya untuk itu murah(media social). Disisi lain efesiensi waktu juga bisa lebih maksimal dan tidak menguras tenaga berlebih”.

Selanjutnya Peneliti Melakukan waawancara dengan Bapak Taufik Akbar S. Sos. Beliau merupakan Staf Badan Organisasi dan tata laksana SEKDA KAB. Pinrang Mengungkapkan :

“Kemajuan dan pesatnya perkembangan teknologi dinda bisa dikatakan seperti pisau bermata 2 sekarang ini, disatu sisi memudahkan kehidupan masyarakat dalam komunikasi tetapi juga menjadi boomerang sendiri khususnya dalam hal aktifitas Politik dewasa ini. Kalau dampak positifnya dengan adanya media itu sendiri masyarakat lebih mudah mengetahui calon kepala daerah beserta visi-misi nya itu sendiri, sehingga msayarakat bisa memilih kepala daerah sesuai dengan visi-misi kepala daerah itu sendiri,

Menurut ***Gabriel Almond***, semua bentuk interaksi manusia melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Dalam pembangunan opini publik, media massa merupakan salah satu media yang sangat strategis. Contohnya saja pemerintah dan para pejabat kantor sangat tergantung pada atensi media, meskipun kekuatan mereka sendiri untuk mengendalikan peristiwa dan untuk membuat tuntutan atas akses yang mereka berikan merupakan keuntungan yang merupakan aksi pencegahan. Contohnya saja pada saat para politisi melakukan kampanye, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan salah satu untuk saluran kampanye. Apalagi dengan arus teknologi ini, rasanya media elektronik menjadi saluran utama bagi jalan untuk mempengaruhi

pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye Pemilu. Hal itu salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu menggunakan internet. Oleh karena itu banyak Partai maupun calon yang akan berkompetisi di Pemilu menggunakan sarana atau saluran kampanye melalui media elektronik khususnya televisi, sehingga semua masyarakat dapat melihat dan mendengar kampanye tersebut lewat media massa yang ada dan dapat menilai mana calon wakil rakyat yang pantas dipilih dan tidak, untuk mewakili rakyat.

D. Dampak Negatif penggunaan media politik

Perkembangan teknologi dalam komunikasi berpengaruh dalam kehidupan manusia baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan juga politik. Bidang politik cukup banyak terpengaruh oleh teknologi komunikasi sendiri. Komunikasi sangat penting dan diperlukan dalam politik dan merupakan salah satu bagian dari kegiatan politik sendiri. Kampanye politik sendiri juga sering mempergunakan media komunikasi di dalamnya. Media online, jejaring social ataupun media social sebagai salah satu produk teknologi komunikasi cukup banyak dipergunakan dalam kampanye pemilu, Konsep McLuhan yang menyatakan bahwa teknologi adalah media menjadi konsep dasar yang menjadi landasan dalam analisis suatu kasus politik. Dari konsep McLuhan ini turun ke dalam beberapa teori yang memiliki kaitan dan juga dapat menjadi pisau analisis dalam berbagai kasus yang ada dalam bidang politik. Dalam

aktifitas politik dan penggunaannya di masyarakat telah menimbulkan dampak negatif di Kabupaten Pinrang.

Terkait dengan dampak negatif penggunaan media dalam berpolitik, Peneliti melakukan wawancara dengan HJ. Masniah, Beliau merupakan Guru SDN 186 pinrang :

“Dan kalau dampak Negatifnya itu, banyak orang yang sering menjelekkkan calon lawan politiknya, banyak berita-berita yang tersebar, kita juga ini masyarakat dipaksakan betul-betul mampu menganalisa, nah kalau dipikir biasa sakit kepalaku, contoh mhi itu kasusnya Ahok nah....! Pusingka mana mhi yang cocok jhe disitu”. Ini mungkin fenomena dari dampak positif dan negatifnya menurut saya dhe”.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Herianto selaku informan, Beliau Merupakan Wartawan *Tribun Timur*, Mengungkapkan :

“Dan kalau kita melihat dampak negatifnya ketika media menjadi alat yang begitu urgen dalam meraih simpati masyarakat karna dengan media kita dapat memkostruk realitas social itu sendiri, dengan mudah seseorang melakukan pencitraan bahkan dengan mejadi sarana untuk menjelekkkan kandidat tertentu sehingga yang menjadi korban masyarakat itu sendiri. Yang korbanpun kami sebagai pekerja media karna dianggap mendukung bahkan menjadi salah satu bagian dari pendukung salah satu calon.”

Selanjutnya Peneliti Melakukan waawancara dengan Bapak Taufik Akbar S. Sos. Beliau merupakan Staf Badan Organisasi dan tata laksana SEKDA KAB. Pinrang Mengungkapkan :

“dampak negatifnya itu bisa dilihat sekarang ini bagaimana saling fitnah bahkan menjelekkkan kandidat tertentu,bahkan bagi para individu yang mendukung salah satu calon terkadang menjelekkkan kandidat lain dalam pesta demokrasi itu sendiri”.

Dalam pemanfaatan jejaring sosial, banyak para oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan jaringan informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat sehingga muncul “Kampanye Hitam” atau “*Black Campaigns*”.

Kampanye Hitam atau “*Black Campaigns*” yang belakangan ini melibatkan media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya diluar dari etika politik. Black Campaigns atau kampanye hitam secara terminologi dapat diartikan sebagai kampanye dengan cara jahat yang dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik dengan isu, tulisan, atau gambar yang tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan untuk merugikan dan menjatuhkan orang lain.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penggunaan Media Massa yang begitu pesat di Kabupaten Pinrang begitu berpengaruh terhadap pola Prilaku Masyarakat terhadap proses politik pilkada di Kabupaten Pinrang, Media Massa telah menjadi bagian dari aktifitas Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang.
2. Penggunaan Media Massa di Kabupaten Pinrang menimbulkan dampak Negatif Maupun Positif di Masyarakat itu sendiri :
 - a) Dampak Negatif.

Dalam pemanfaatan media elektronik dan media cetak (media massa) di lingkungan social masyarakat, banyak para oknum yang tidak bertanggung jawab menyalah gunakan jaringan informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat sehingga muncul “Kampanye Hitam” atau “*Black Campaigns*”.

Kampanye Hitam atau “*Black Campaigns*” yang belakangan ini melibatkan media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya diluar dari etika politik. Black Campaigns atau kampanye hitam secara terminologi dapat diartikan sebagai kampanye dengan cara jahat yang dilakukan

untuk menjatuhkan lawan politik dengan isu, tulisan, atau gambar yang tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan untuk merugikan dan menjatuhkan orang lain.

b) Dampak positif.

Kemajuan dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat berdampak positif terhadap kehidupan social masyarakat dalam hal komunikasi. Dengan adanya media massa masyarakat lebih mudah mengakses dan menerima informasi terkait kegiatan Politik itu sendiri, masyarakat lebih mudah mengetahui calon kepala daerah beserta dengan visi misinya, serta lebih mudah mengkampanyekan masing masing kandidat yang di unggulkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat harus lebih bijak dalam Menggunakan Media Massa dalam aktifitas Politiknya
2. Masyarakat harus memfilter berita-berita yang muncul di media cetak maupun elektronik (Media Massa)
3. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengontrol penggunaan Media Massa di Masyarakat itu sendiri, Untuk Menghindari Konflik Horizontal maupun Vertikal di Masyarakat itu sendiri.

DaftarPustaka

- A.S. Achmad, 1992. *Komunikasi Media Massa, dan Khalayak*.
Hasanuddin University Press. Ujung Pandang
- Ardial, 2009. *Komunikasi Politik*. PT. Indeks, Jakarta.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosialatas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3S.
- Damsar. 2012. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta :Kencana
- Goodman, Douglas J, dan George Ritzer. 2004. *TeoriSosiologi Modern*.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hamad, Ibnu.2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media*.Jakarta:
Granit,
<http://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB%20II.pdf>
<http://old.ui.ac.id/id/news/archive/6999>
<http://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html>
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-partisipasi-politik.html>
- Lukmanul, Hakim. 2013. *Visi dan misi kandidat calon pilgub*. Diakses
tanggal 26 Agustus 2016. html <http://www.bisnis-jateng.com>

- Maleong, Ixi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Munarfah, M. Andi dan Hasan Muhammad. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Praktika Aksara Semesta.
- Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung :Tarsito.
- Nimmo, Dan Arifin.2000. ***Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media***. PT. RemajaRosda.Karya. Bandung
- Prihanto, Hendri. 2009. Paradigm Prilaku social. Di akses pada tanggal 30 Agustus 2016. <http://henriprihantono.blogdetik.com>
- Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rineka Cipta. Kuswandi, Wawan. 2008. *Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Roni, M.Si. 2012. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Sahid Gatara. A. A. 2007. *SosiologiPolitik*. Bandung :Pustakasetia
- Samsuryadi. 2010. Teori prilaku social max weber teori sosiologi klasik. Diakses tanggal 26 Agustus 2016. <http://galihdanary.wordpress.com>

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press..

Skripsi. UNNES Kuswandi, Wawan. 1993. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta:

LAMPIRAN

Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana Perkembangan penggunaan Media Massa di Kabupaten Pinrang!
2. Bagaiman Pengaruh penggunaan Media Massa dalam mempengaruhi pola Prilaku Sosial Politik Masyarakat Di Kabupaten Pinrang!
3. Apa yang menjadi alasan Individu atau masyarakat menggunakan Media Massa dalam aktivitas Politik!
4. Apa dampak Positif dalam Penggunaan Media Massa dalam Proses Politik Di Kabupaten Pinrang!
5. Apa dampak Negatif dalam Penggunaan Media Massa dalam Proses Politik Di Kabupaten Pinrang!

LAMPIRAN 2.

DOKUMENTASI



Proses Wawancara Dengan Bapak Gosali Riadi
Pegawai Honorer Discapil Kab.Pinrang



Proses Wawancara Dengan Ibu Hj. Masniah

Guru SDN 186 Pinrang



Dokumentasi Dengan Pak mursalim Sekretaris Camat Lembang
Setelah Wawancara



Proses Wawancara Dengan Bapak Zainal Arifin

Selaku Pengurus DPD partai Gerindra



Kantor Camat Lembang

RIWAYAT HIDUP



Syamsuddin, Dilahirkan di Dusun Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Ju'mat 06 Januari 1991, dari buah cinta kasih pasangan Ayahanda Halim dan Ibunda Bulung. Penulis mulai masuk SDN 186 Pinrang 1998 dan tamat tahun 2004, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan sekolah ketingkat selanjutnya di SMP Negeri 3 Pinrang dan tamat pada tahun 2007, dan pada tahun sama melanjutkan Sekolah di SMK Baramuli Pinrang dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2012 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar program studi strata satu (S1) Jurusan Pendidikan Sosiologi dan selesai pada tahun 2017.

Selama mengenyam bangku kuliah, penulis aktif di berbagai organisasi Eksternal Kampus, KMP (Kesatuan Mahasiswa Pinrang) serta menjadi pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Pendidikan Sosiologi tahun 2014-2015.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Penggunaan Media Massa Pada Proses Politik Pilkada di Kabupaten Pinrang** “.

